ANALISIS PENDIDIKAN JASMANI DI INDONESIA DARI BEBERAPA ASPEK KEBUTUHAN DASAR

Thamrin

Guru Pendidikan Jasmani SMP N 4 Torgamba Email: thamrinspd77@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research was an attempt from the various parties for more attention, appreciate and completed the minuse about physical education learning and sport in school for common interest to understanding Indonesians people with step by step education to do the exercise, to see and joint to responsible success achievements sport for more goodnes and continues.

As for as a discussion that could be observed from this article is: (1) A need to pay attention serious and earnest from the government, related agencies, the community and industry including the employers to play an active role in education physical and sports for the student in any schoo, (2) The curriculum should be used can be extrapolated to a prolonged period of time with the concept of that is almost the same, every new at the helm of the department especially from Depdiknas, (3) Book as a reference should not only have one book just, but must be the various book support to scientific that was held in learning physical education and sports, (4) Facilities and infrastructure required to learning physical education in schools still inadequate efficiently and memnuhi standards of infrastructure of tersebuty at school, (5) Teachers as a professional whose are part of the development the potential of human resources (SDM) must be able to upgrading and skills in all things, (6) Teachers welfare and educator other must have to pay serious attention from the central government that give salary.

Keywords: Physical Education, Curriculum, Book, Theacer.

Abstrak

Tujuan mendasar dalam penulisan artikel ini adalah adanya upaya dari berbagi pihak untuk lebih memperhatikan, menghargai dan melengkapi apa yang kurang tentang pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahrga di setiap sekolah demi kepentingan bersama untuk menyadarkan manusia Indonesia melalui jenjang pendidikan untuk mau melakukan kegiatan olahraga secara sukarela, memperhatikan dan ikut serta bertanggung jawab pada kemajuan dunia olahraga prestasi untuk lebih baik lagi dan berkesinambungan.

Adapun sebagai bahan diskusi yang dapat disimpulkan dari artikel ini adalah; (1) Perlunya perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah, instansi terkait, masyarakat dan dunia industri termasuk para pengusaha untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga bagi para siswa di setiap sekolah, (2) Kurikulum

yang dipergunakan sebaiknya dapat dipakai untuk jangka waktu lama dengan konsep yang hampir sama, pada setiap pergantian pucuk pimpinan departemen khususnya Depdiknas, (3) Buku sebagai referensi seharusnya tidak hanya mempergunakan satu buku saja, tetapi harus adanya bermacam-macam buku yang menunjang terhadap keilmuan yang dilaksanakan pada proses pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, (4) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah masih belum memadai secara layak dan memnuhi standar dari sarana prasarana tersebuty di sekolah, (5) Guru sebagai seorang profesional yang merupakan bagian dari pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam segala hal, (6) Kesejahteraan para guru dan pendidik lainya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat yang memberikan gaji.

Kata Kunci: Pendidikan, Jasmani, Kurikulum, Guru, Buku

PENDAHULUAN

Pendidikan jasmani di Indonesia, istilahnya telah dikenal sejak tahun 1950-an, cukup lama menghilang dari wacana, terutama sejak tahun 1960-an, tatkala istilah itu diganti dengan istilah olahraga. Dampak dari perubahan tersebut sangat luas dan mendalam, terutama terhadap struktur dan isi kurikulum disemua jenjang pendidikan sekolah. Kesalahpahaman juga terjadi terhadap makna kedua istilah itu, karena hampir selalu hanya dikaitkan dengan kepentingan pembinaan fisik, seperti untuk tujuan berprestasi atau sebatas pencapaian derajat kebugaran jasmani.

Upaya pembaruan pendidikan jasmani, yang terpayungi dalam kerangka sistem pendidikan nasional, berlangsung dalam sebuah bentangan pergulatan antara dorongan untuk berubah dalam kesinambungan di satu pihak dan tahanan untuk pelestarian di pihak lainnya.

Untuk memahami secara mendalam pendidikan jasmani tersebut ada beberapa definisi yang pernah dikembangkan di Indonesia diantaranya dalam UU Pendidikan No 4 tahun 1950, pasal 9 adalah; "untuk membentuk keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani, maka pendidikan jasmani diselenggarakan di semua jalur sekolah." Bahkan dalam perkembangan pendidikan berikutnya maka definisi dan kebijakan pendidikan

jasmani tersebut seperti di atur dalam SK. Mendikbud No. 413/U/1987, berbunyi; "pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional."

Dari uraian penjelasan SK Mendikbud tersebut bahwa pendidikan jasmani lebih jelas dan peranannya dalam pendidikan, sementara itu bila disimak dalam UU Sistim Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 hanya berupa isi kewajiban dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk memuat pelajaran "pendidikan jasmani dan olahraga." Artinya pendidikan jasmani dan olahraga itu hanya dianggap sebagai mata pelajaran di sekolah dengan tanpa penjelasan yang lebih rinci dan terarah dari bentuk kegiatan dan pelaksanaan yang sebenarnya dalam UU Sisdiknas tersebut. Dari kenyataan yang dijumpai di lapangan sebelum adanya UU Sisdiknas, pengalaman yang telah dilalui banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan prilaku anak yang tidak tersalurkan dalam bentuk aktivitas fisik di sekolah melalui kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga dengan manifestasi pada prilaku yang tidak baik bahkan menyimpang dan melanggar tata susila/adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Hal itu dimungkinkan oleh kurangnya aktivitas fisik anak yang tidak dapat menyalurkan sisa energinya dalam bentuk aktivitas yang positif dalam pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga secara maksimal di sekolah.

Meskipun dari UU Sisdiknas tersebut diharapkan adanya penjelasan dalam keputusan pemerintah berupa SK Mendiknas, tetapi sampai sekarang ini belum tergambar dan terbayangkan bagaimana kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga di jenjang pendidikan (jalur sekolah). Sebab pada perkembangan terakhir tentang pendidikan jasmani dan olahraga tersebut, terutama ada informasi terakhir bahwa pengelolaan pendidikan jasmani dan olahraga di kelola secara bersama oleh Mendiknas dan Menegpora. Dengan pengaturan bahwa segala sesuatu program, rencana dan fasilitas serta kemungkinan juga

kurikulum, dikelola dan dipegang oleh Menegpora. Sementara itu ketenagaan (guru) masih diatur dan dikelola oleh Mendiknas, itu adalah suatu hal yang akan membuat pendidikan jasmani dan olahraga di dunia pendidikan untuk masa yang akan datang menjadi suatu hal yang membuat simpang siur dan sepertinya tidak jelas .

Dari situasi demikian sepertinya ada suatu kekhawatiran yang akan mengaburkan kepentingan dan kelanjutan dari pendidikan jasmani dan olahraga tersebut. Tetapi dengan adanya Rapornas (Rapat Pemuda dan Olahraga Nasional) yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 Juni 2005, diharapkan akan memberikan suatu nuansa baru dan menjanjikan sehingga akan menjadi jelas bagi masa depan pendidikan jasmani dan olahraga dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Pada tulisan ini akan dicoba untuk menguraikan bagaimana konsep pendidikan jasmani Indonesia di tinjau dari ruang lingkup kepentingan dasar dari segi kurikulum, buku pegangan siswa dan guru, sarana prasarana, sumber daya manusia (ketenagaan), dan kesejahteraan.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Kurikulum

Kurikulum pendidikan jasmani yang paling ideal, sungguh sukar untuk dijawab. Sebab, pada akhirnya, kurikulum itu merupakan buah hasil kesepakatan antara berbagai pihak, meliputi para pembuat kebijakan, ilmuwan di bidang olahraga, dan para praktisi di lapangan, seperti guru, pelatih dan pembina olahraga pada umumnya.

Pada perkembangannya ada beberapa model kurikulum pendidikan jasmani yang pernah berlaku dalam masa kehidupan bangsa dan negara Indonesia sampai sekarang ini. Pemahaman terhadap model kurikulum ini sangat penting artinya, agar pihak-pihak pengelola kurikulum, terutama

ditingkat sekolah, dapat bekerjasama dalam pengembangan dan implementasinya. Sebab terjadinya ketidak mampuan dalam memahami dan mengaplikasikan kurikulum yang berlaku, maka akan mengakibatkan terjadinya masalah pendidikan jasmani itu sendiri.

Pemahaman terhadap krisis pendidikan jasmani juga tertuju pada isu global disamping isu yang bersifat nasional. Dalam kaitan ini, kita harus sudah mulai berpikir secara global dan kemudian lebih mahir berbuat pada tingkat lokal. Antara krisis yang bersifat global dan nasional, serta lokal, kesemuanya saling berkaitan satu sama lain. Pemahaman terhadap krisis pendidikan jasmani pada tingkat global dan tingkat nasional (Indonesia), tidak lepas dari tinjauan terhadap model kurikulum yang diterapkan dalam pengembangan program pendidikan jasmani di sekolah.

Ada beberapa model kurikulum pendidikan jasmani yang dikembangkan, dan pernah dipergunakan di Indonesia, diantaranya "ada tiga model yaitu model pendidikan olahraga, model analisis gerak, dan model kesegaran jasmani yang berorientasi pada penguasaan materi bidang studi." Dari ketiga model yang pernah dipergunakan di Indonesia, sampai sekarang ini masih belum ditemukan suatu formulasi atau bentuk model kurikulum yang ideal untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan jasmani di jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Sebab hal itu dapat dilihat dari impelentasi dalam hasil suatu kegiatan pada jenjang pendidikan yang tidak memberikan makna pada kegiatan individu manusia Indonesia yang sadar melaksanakan olahraga ataupun meningkatkan prestasi olahraga secara umum dalam kancah percaturan internasional. Paling-paling ada beberapa cabang olahraga saja yang sudah dapat berbicara secara luas dan leluasa di dunia olahraga internasional.

Hal demikian membuktikan bahwa regenerasi dan persiapan mental, fisik, dan kesadaran manusia Indonesia untuk melakukan olahraga secara sukarela untuk melakukannya, maupun membantu kegiatan olahraga itu sendiri

bahkan untuk perhatian sekalipun hanya pada beberapa cabang olahraga prestasi saja. Sebagai contoh, orang akan merasa tidak tertarik untuk melihat pelaksanaan kejuaraan Atletik, baik di daerah maupun di tingkat Nasional. Berbeda dengan cabang olahraga Sepak Bola, Basket, Bola Voli maupun Bulu Tangkis, perhatian masyarakat sebagai penonton cukup antusias.

2. Tinjauan Buku

Buku sebagai salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan kurikulum di sekolah tersebut, masih banyak dijumpai beberapa hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah tidak adanya standarisasi materi, model, bentuk, metode, pendekatan yang diberikan atau dipergunakan yang seragam atau sama di seluruh Indonesia.

Padahal buku merupakan jembatan pengetahuan yang harus dibaca dan dipahami secara jelas dan nyata oleh para siswa dan guru di sekolah. Tanpa adanya kesamaan persepsi pada materi, model, bentuk, metode dan pendekatan pada pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, hal itu mengakibatkan pada ketidak jelasan dan perbedaan pada pemahaman dan pelaksanaan pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah khususnya Mendiknas maupun Dirjen Olahraga pada masa yang lalu, kurang memberikan perhatian dan tanggapan terhadap buku pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang menjadi pegangan bagi siswa dan guru. Meskipun ada yang dibuat dan diprakarsai oleh Dirjen Olahraga, masih adanya nuansa *nepotisme* yang dilakukan oleh oknum di jajaran Dirjen Olahraga dan Diknas untuk membuat proyek buku bagi siswa dan guru di SD, SLTP dan SLTA. Tetapi hal itu tidak dapat membendung pertumbuhan dan perkembangan buku yang disebar luaskan oleh para penerbit dengan pengarang dan materi, bentuk, model dan pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap daerah di seluruh

Indonesia yang dipakai oleh sekolah-sekolah, akibatnya terjadi ketidak seragaman. Karena masing-masing daerah memiliki dan memanfaatkan penerbit yang ada di daerah dengan para pengarang yang berada di daerah itu juga.

Sampai berakhirnya Dirjen Olahraga, ternyata buku yang dibuat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai buku pegangan oleh siswa dan guru, yang berarti hal itu hanya bersifat *proyek* untuk memberikan nuansa ketidak mampuan instansi tersebut dalam memberikan kebijakan secara menyeluruh yang diberlakukan pada sekolah-sekolah. Keberadaan buku yang dikeluarkan oleh Dirjen Olahraga dan disebar luaskan keseluruh sekolah di Indonesia tersebut, hanya dijadikan sebagai referensi bagi siswa dan guru untuk pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Sedangkan buku pegangan yang dipergunakan oleh siswa dan guru tersebut masih menggunakan buku yang berasal dari para penerbit dan pengarang yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing.

Buku yang dijadikan sebagai referensi diperlukan dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, tetapi tidak boleh menggunakan satu buku saja sebagai buku pegangan apalagi buku pelajaran yang lebih mengarahkan pada kemampuan kognitif, apektif dan psikomotor seperti pendidikan jasmani dan olahraga.

Penggunaan satu buku sebagai buku pegangan bukan sebagai bahan referensi untuk suatu pelajaran akan menghambat pada penalaran siswa yang menjadikannya tidak kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, dan hal itu akan menjadikan suatu monopoli penerbit yang hanya berorientasi pada pasar dan kebutuhan semata tanpa memperhatikan mutu dari buku tersebut. Sebagai contoh, bila terjadi perubahan kurikulum maka pengarang dan penerbit khususnya, hanya mengganti jilid buku tersebut dengan kata-kata "disesuaikan dengan kurikulum". Padahal materi dan model, bentuk, metode serta pendekatan pembelajaran dari buku tersebut tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, berarti pengarang dan penerbit tersebut hanya

mengharapkan *profit* belaka dari penjualan buku tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari buku tersebut pada dunia pendidikan umumnya, guru dan siswa khususnya.

Dari situasi demikian pemerintah dalam hal ini Mendiknas atau juga Menegpora nantinya harus berani mengambil sikap untuk menyamakan persepsi daripada buku pegangan dan referensi untuk pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang secara standarisasi nasional sama dalam hal materi, model, bentuk, metode, pendekatan yang dipergunakan, meskipun penerbit dan pengarangnya berada di daerah masing-masing tetapi memiliki kesamaan persepsi dalam pendidikan jasmani dan olahraga, sebab pendidikan jasmani dan olahraga pada intinya sama tanpa adanya perubahan yang cepat dan drastis secara global. Melainkan konsep dasar dari materi pendidikan jasmani adalah tetap dan tanpa perubahan, terkecuali model, bentuk metode dan pendekatan yang selalu berubah disesuaikan dengan kemajuan dan tuntutan. Bahkan yang cepat dan pesat perkembangannya dalam dunia olahraga adalah yang bersifat pada olahraga prestasi, sedang untuk pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan disekolah masih seperti sebelumnya atau tanpa perubahan yang cukup drastis dan berarti.

Dapat diasumsikan bila buku yang dijadikan sebagai pegangan ataupun referensi yang beraneka ragam tetapi memiliki kesamaan persepsi maka dengan sendirinya arah dan tujuan dari pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah tersebut akan sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara Indonesia untuk dapat menjadikan manusia yang sehat jasmani dan rohaninya serta juga akan dapat menghasilkan atlit-atlit yang berbakat dan potensial untuk masa yang akan adatang.

3. Tinjauan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menjadikan pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga berjalan lancar, tidak boleh dilupakan dan dianggap enteng untuk dapat terlaksananya kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di setiap jenjang pendidikan dengan baik.

Keberhasilan suatu pembelajaran akan banyak ditentukan salah satunya oleh sarana dan prasarana yang mendukung pada proses pembelajaran tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga di setiap sekolah, sampai waktu sekarang ini masih dirasakan belum mencukupi dan masih banyak kekurangannya, bahkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan untuk standarisasi sarana dan prasarana bagi kepentingan proses pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga tersebut di sekolah. Keperluan sarana dan prasana yang dibutuhkan demi kelancaran pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga tersebut, bukan hanya harus tergantung pada pemerintah dan sekolah saja melainkan juga keterlibatan pengusaha, industri dan masyarakat secara umum juga harus terlibat.

Adapun sarana dan prasana yang tersedia di setiap sekolah hanya bersifat melengkapi saja untuk suatu aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani tanpa memperhitungkan baik dan buruknya peralatan maupun fasilitas yang dipergunakan bahkan yang lebih ironisnya lagi tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa pada saat akan melakukan proses pembelajaran tersebut. Sebab, bila hal itu tersedia di suatu sekolah, maka kelengkapan fasilitas tersebut tidak dapat dipergunakan secara maskimal dalam waktu yang cukup relatif lama juga tidak diperhitungkan rasio siswa yang belajar dengan peralatan yang diperlukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Artinya kelengkapan sarana dan prasarana tersebut harus selalu diadakan bila memasuki tahun pelajaran baru, bahkan untuk kepentingan yang berhubungan dengan keberadaan lapangan olahraga yang diperlukan pada pelaksanaan

proses pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga untuk beberapa sekolah baik itu yang berada di daerah terlebih lagi yang berada di kota, apakah itu sekolah swasta ataupun sekolah negeri. Sudah dapat dipastikan tidak semuanya memiliki lapangan olahraga yang dimaksud, sebab apa? Dalam hal ini pemerintah terutama Mendiknas tidak memberikan suatu keharusan yang mengikat bagi suatu lembaga pendidikan baik itu jenjang pendidikan TK, SD, SLTP maupun SLTA bahkan disinyalir ada beberapa Perguruan Tinggi sekalipun yang menekuni bidang olahraga tidak melengkapinya. Untuk melengkapi keberadaan lapangan olahraga yang memadai untuk kepentingan proses pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah tersebut, kenyataannya berbeda dengan di luar negeri bahwa hampir setiap sekolah itu memiliki sarana dan prasarana olahraga yang lengkap dan memadai.

Sebagai bahan ilustrasi yang dapat dijadikan suatu kajian dalam hal kebijakan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasana olahraga di sekolah, adalah memberikan batas minimal kepada setiap sekolah untuk memiliki lapangan olahraga tanpa harus memperluas ruang kelas dan menambah jumlah siswa yang tidak dapat dikelola dengan baik. Apakah itu untuk sekolah negeri maupun untuk sekolah swasta sekalipun.

4. Tinjauan Guru

Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar di setiap sekolah khususnya untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, sampai saat ini yang dimulai dari ditutupnya SGO dan SPG sekitar pada tahun 1989/1990, masih mengalami kekurangan dan keterbatasan kemampuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Seperti pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009 masalah; "a) ketersediaan pendidik yang belum memadai (kuantitas maupun

kualitas), b) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, c) fasilitas belajar belum mencukupi, d) biaya operasional pendidikan belum memadai, e) pembangunan pendidikan belum dapat meningkatkan kemampuan wirausaha, f) manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien dan g) anggaran pembangunan pendidikan belum memadai." Jelaslah bahwa masalah guru atau sebagai Sumber Daya Manusia yang berprofesi sebagai guru masih banyak kekurangan yang dijumpai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dari penjabaran di atas yang disoroti disini adalah pada ketersediaan pendidik dengan memiliki tujuan dari rencana diatas adalah sebagai berikut; terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, terstandar, profesional, dan sejahtera, serta mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan nasional. Begitu juga halnya dengan guru pendidikan jasmani dan olahraga, lebih-lebih harus memiliki kemampuan atau kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Kompetensi pribadi diartikan sebagai arah untuk dapat : mengembangkan kepribadian, berinteraksi dan komunikasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah dan melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.

Kompetensi profesional diartikan sebagai arah untuk dapat : menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran dan menilai hasil dan proses pembelajaran.

Kompetensi Sosial diartikan sebagai arah untuk dapat : bekerjasama dengan orang lain dan memiliki sikap dan kepribadian yang positip serta melekat pada setiap kompetensi yang lain.

Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh guru sebagai seorang pendidik dan pengajar sebaiknya memiliki kriteria seperti dikatakan Freeman yaitu,

"keberhasilan seorang guru harus memiliki latar belakang pendidikan, kesehatan dan keterampilan fisik, kemampuan intelektual, kepribadian mengajar dan daya tarik, kualitas pengajar sukses." Bila hal ini terjadi dikalangan para guru, maka profesonalisme seperti yang diharapkan dalam RUU guru, kegiatan pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik. Untuk itu Depdiknas dalam hal ini Dikgutentis berupaya menyeleggarakan peatihan dan lokakarya bagi para guru kelas dan agama di sekolah dasar untuk ditatar dan dilatih guna dibekali dengan kemampuan mengajar dan mendidik dalam pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Bila dilihat secara keilmuan hal itu jelas menyalahi apa yang disarankan oleh Freeman sebelumnya, tetapi untuk memenuhi kekurangan guru pendidikan jasmani dan olahraga di SD maka hal itu ditempuh dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, bahkan untuk beberapa daerah yang dijadikan sebagai uji coba yaitu di Padang, Jakarta, Surabaya dapat dilaksanakan dengan baik. Maka berdasarkan hal itu dikembangkanlah program tersebut ke seluruh propinsi di Indonesia, dan sekarang ini menginjak pada tahun kedua.

5. Tinjauan Kesejahteraan

Kesejahteraan para guru atau pendidik sampai sekarang ini masih belum memadai bahkan kalu dikaji secara seksama, maka hal itu akan berada pada penggajian di bawah Upah Minimal Regional (UMR). Ini terbukti dengan masih banyak dijumpai guru yang melakukan aktivitas diluar profesinya sebagai seorang guru, ada yang bertindak sebagai tukang ojek bahkan ada yang menjadi guru honorer kesana kemari demi memenuhi kebutuhan keluarga ataupun halhal lainnya yang dianggap masih halal.

Dalam hal ini pemerintah melalui suatu lembaga yang berusaha mengangkat derajat guru telah berupaya semaksimal mungkin, hanya saja kesejahteraan seperti yang dilakukan di negara Malaysia, masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab, pemerintahan sebelumnya lebih mengutamakan investasi pada peningkatan pembangunan yang sifatnya riil yaitu ekonomi dan industri. Sehingga alokasi dana untuk kepentingan pendidikan di dalamnya termasuk kesejahteraan para guru dan pendidik lainnya, belum terpenuhi secara baik.

Meskipun dalam hal ini Depdiknas memberikan rangsangan berupa kenaikan pangkat dan golongan otomatis bagi mereka yang berprestasi, ataupun juga bagi mereka yang banyak melakukan inovasi serta kreasi dalam pengembangan ke profesionalismenya tersebut mendapat penghargaan dari pemerintah dalam hal ini Depdiknas.

Desakan terbentuknya Undang-undang Guru diharapkan akan lebih menjamin pada kedudukan hukum, profesionalisme, penghargaan, kesejahteraan juga kelayakan hidup bagi seorang pendidik akan terjamin sebagaimana yang diharapkan setiap manusia. Terlebih lagi adanya pengakuan yang menghargai dari seluruh lapisan masyarakat kepada para guru yang kecenderungannya sekarang ini ada tendensi memudarnya masyarakat terhadap profesi guru yang dihormati dan disegani karena kedudukan dan martabatnya sebagai seorang pendidik anak manusia.

KESIMPULAN

Sebagai dasar dari pemikiran yang telah dijabarkan secara panjang lebar pada bagian sebelumnya, ada satu hal yang harus diperhatikan secara seksama yakni konsep pendidikan jasmani Indonesia ditinjau dari ruang lingkup kepentingan dasar.

Kepentingan dasar yang dimaksud dalam artikel ini adalah adanya upaya dari berbagi pihak untuk lebih memperhatikan, menghargai dan melengkapi apa yang kurang tentang pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahrga di setiap sekolah demi kepentingan bersama untuk menyadarkan manusia Indonesia melalui jenjang pendidikan untuk mau melakukan kegiatan olahraga secara sukarela, memperhatikan dan ikut serta bertanggung jawab pada kemajuan dunia olahraga prestasi untuk lebih baik lagi dan berkesinambungan.

Adapun sebagai bahan diskusi yang dapat disimpulkan dari artikel ini adalah

- 1. Perlunya perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah, instansi terkait, masyarakat dan dunia industri termasuk para pengusaha untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga bagi para siswa di setiap sekolah.
- 2. Kurikulum yang dipergunakan sebaiknya dapat dipakai untuk jangka waktu lama dengan konsep yang hampir sama, pada setiap pergantian pucuk pimpinan departemen khususnya Depdiknas.
- 3. Buku sebagai referensi seharusnya tidak hanya mempergunakan satu buku saja, tetapi harus adanya bermacam-macam buku yang menunjang terhadap keilmuan yang dilaksanakan pada proses pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga.
- 4. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah masih belum memadai secara layak dan memnuhi standar dari sarana prasarana tersebuty di sekolah.
- 5. Guru sebagai seorang profesional yang merupakan bagian dari pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam segala hal.
- 6. Kesejahteraan para guru dan pendidik lainya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat yang memberikan gaji.

55

DAFTAR PUSTAKA

- Freeman, William H. *Physical Education and Sport (In a Changing Society*) Sixth Ed. (Allyn & Bacon A Pearson Education Company. USA. 2001).
- Irwin, Leslie W. *The curriculum in health and Physical Education*. (WMC. Brown Company Publisher. Dubuque, Iowa. USA. 1960).
- Lutan, Rusli, dkk. Supervisi Pendidikan Jasmani : Konsep dan Praktek. (Depdiknas, Dikdasmen-Dirjen Olahraga. Jakarta. 2002).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 2009.
- Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003, disertai penjelasan. (Penerbit Absolut, Jakarta. 2004).